BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada *World Food Programme* (WFP) melalui program *Food For Assets* (FFA). Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan *World Food Programme* (WFP) melalui program padat karyanya dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Indonesia, studi kasus yang diteliti adalah di Nusa Tenggara Barat dimana program *Food For Assets* (FFA) berjalan.

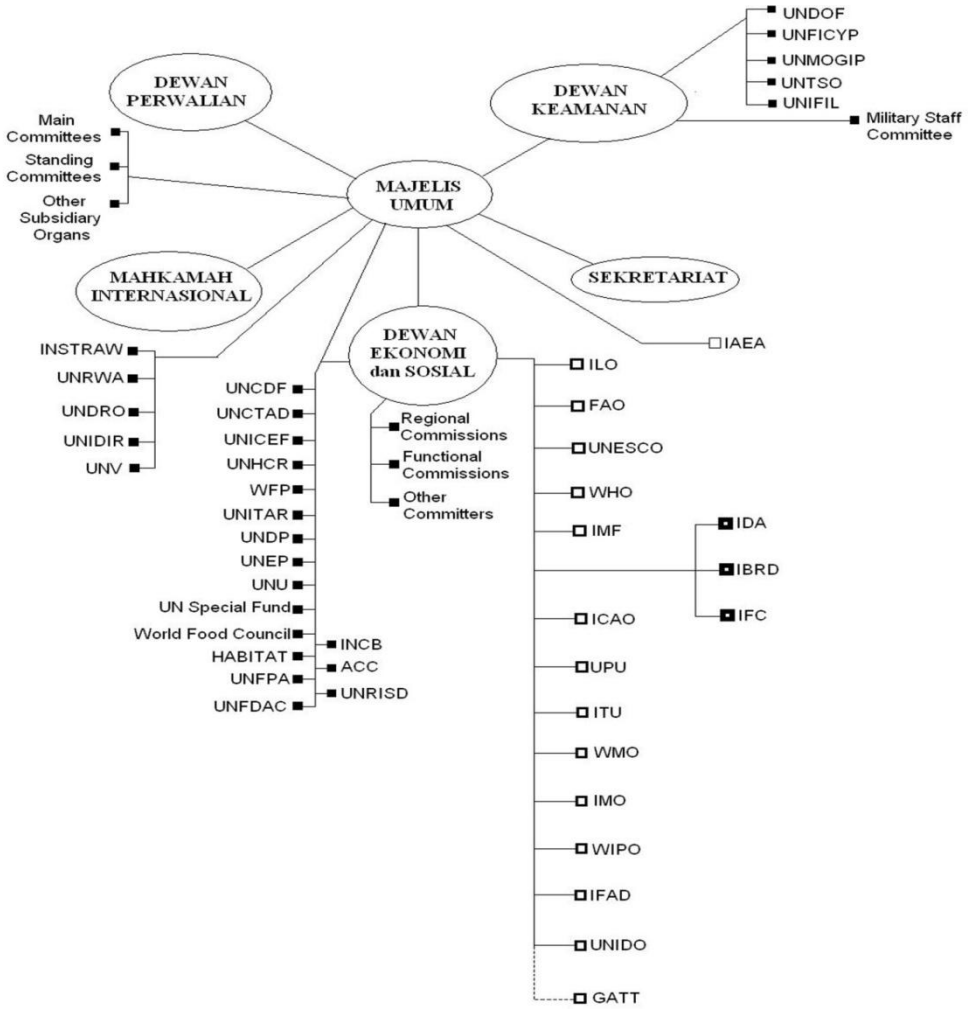
3.1.1 Gambaran Umum *World Food Programme* (WFP)

3.1.1.1 Sejarah Pendirian *World Food Programme* (WFP)

Menurut D. John Shaw dalam bukunya *The UN World Food Programme and the Development of Food Aid*. Ide lahirnya *World Food Programme* (WFP) terjadi pada tahun 1960 yang pada awalnya digagas oleh George McGovern (Direktur pertama dari *Food for Peace* di Kantor Eksekutif Amerika Serikat) pada masa pemerintahan presiden John F. Kennedy (Shaw, 2001:6).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendirikan *World Food Programme* pada tahun 1961, lahir sebagai badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani bantuan pangan, dan secara tidak langsung berada di bawah

pengawasan Badan Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization*-FAO) di Roma, Italia (http://www.kemlu.go.id/ Diakses 14 Maret 2014).



Sumber: (Suryokusumo, 1987:202).

Gambar 3.1
Sistem Perserikatan Bangsa-bangsa

World Food Programme (WFP) pertama kali beroperasi pada 1963 dengan tugas menggunakan bantuan pangan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, menyediakan makanan dan logistik lainnya jika dalam keadaan darurat, dan secara umum mempromosikan *world food security* (ketahanan pangan dunia). *World Food Programme* adalah sebuah lembaga kemanusiaan terbesar di dunia

yang berkantor pusat di Roma, Italia, juga memiliki kantor perwakilan yang tersebar di 80 negara. *World Food Programme* bekerja untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memperoleh atau menghasilkan pangan baik bagi diri sendiri dan keluarganya. Setiap tahunnya, *World Food Programme* memberi makan sekitar 90 juta orang, dengan sebagian besarnya adalah anak-anak, di 80 Negara yang mengalami krisis atau rawan pangan (http://www.wfp.org/Diakses 14 Maret 2014).

World Food Programme melakukan operasinya bersama dengan dua badan lain, yaitu (*Food and Agriculture Organization*-FAO) dan (*International Fund for Agricultural Organization*-IFAD) dengan melakukan kerjasama dan saling terkoordinasi. Tiga badan yang saling berhubungan ini disebut "*Triple Alliance in Rome*", karena ketiga badan ini berpusat di Roma, Italia. Bergerak secara komplementer. Ketiganya bekerja untuk memenuhi amanat *World Food Summit* dalam mengurangi kelaparan global dan kemiskinan. *World Food Programme* (WFP) melakukan operasi bantuan pangan, sedangkan *Food and Agriculture Organization* (FAO) bergerak melalui bantuan pembangunan pertanian secara teknis, dan *International Fund for Agricultural Organization* (IFAD) melakukan bantuan keuangan internasional (http://www.wfp.org/aboutwfp/partners/agencies.asp?section=1&subsection=4 Diakses 14 Maret 2014).

3.1.1.2 Tujuan dan Fungsi *World Food Programme* (WFP)

World Food Programme (WFP) bergerak untuk menghapuskan kelaparan dan malnutrisi, dengan tujuan utama menghilangkan kebutuhan akan bantuan

pangan. Strategi utama yang mendasari aktivitas *World Food Programme* adalah menyediakan bantuan pangan dengan tujuan:

a. Menyelamatkan manusia yang merupakan pengungsi dan dalam situasi darurat lainnya,
b. Memperbaiki gizi dan kualitas hidup masyarakat yang paling rentan pada saat mendesak,
c. Membantu membangun aset dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin khususnya melalui program-programnya.

Dalam menjalankan tujuan utamanya *World Food Programme* mengimplementasikan program dan aktivitas bantuan pangannya dengan cara:

1. Membantu pembangunan ekonomi dan sosial dengan berkonsentrasi pada kebutuhan masyarakat dan Negara yang bersangkutan.
2. Membantu secara terus menerus dari saat darurat sampai terjadinya pembangunan dengan memprioritaskan pada pencegahan bencana dan rehabilitasi pasca terjadinya bencana.
3. Membantu menemukan korban konflik dan pihak yang membutuhkan sumbangan pangan, dan menyediakan kebutuhan mereka baik dalam hal pangan dan juga pembangunan.
4. Menyediakan layanan bagi Negara pendonor, badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan (*Non-Govermental Organization*-NGOs) agar dapat konsisten pada tujuan *World Food Programme* dan melengkapi operasi *World Food Programme*.

World Food Programme (WFP) juga mengumpulkan kelebihan pangan yang terjadi di suatu negara dan menyalurkannya sebagai bantuan kemanusiaan untuk mengatasi keadaan darurat pangan di negara-negara yang dikategorikan sebagai Negara *Low Income Food Deficit Countries* (LIFDCs), bantuan tersebut diberikan oleh *World Food Programme* (WFP) dengan sasaran:

1. Untuk menutupi kekurangan pangan yang mendesak akibat bencana alam, konflik sosial dan akibat peperangan, dan
2. Untuk membantu pelaksanaan proyek-proyek pengembangan ekonomi sosial.

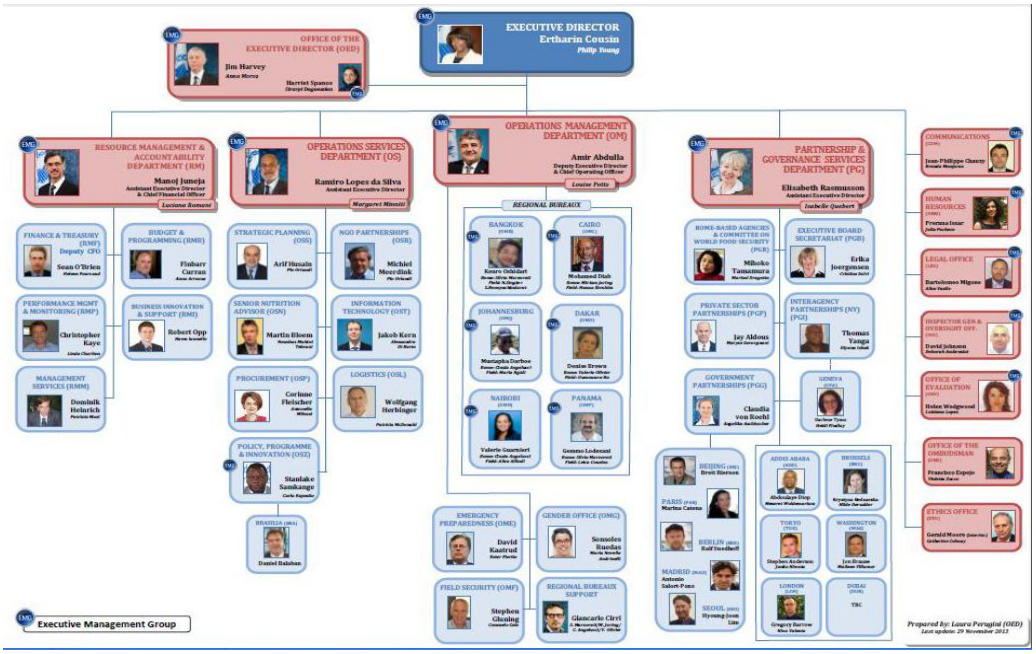
Berdasarkan rencana strategis *World Food Programme* 2008-2013, *World Food Programme* (WFP) dimandatkan untuk:

1. Menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian dalam keadaan darurat,
2. Mencegah kelaparan akut dan berinvestasi dalam kesiapsiagaan dan tindakan mitigasi bencana,
3. Mengembalikan dan membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian pasca-konflik, situasi pasca bencana atau situasi transisi,
4. Mengurangi kelaparan kronis dan kekurangan gizi,
5. Memperkuat kapasitas Negara-negara berkembang untuk mengurangi kelaparan, termasuk melalui bantuan dan pembelian lokal.

3.1.1.3 Struktur Organisasi *World Food Programme* (WFP)

World Food Programme (WFP) dipimpin oleh seorang *Executive Director* dan dibantu oleh seorang wakil (*Deputy Executive Directors*). *Executive Director World Food Programme* ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan Direktur Jenderal FAO setelah berkonsultasi dengan Dewan (*Board*) *World Food Programme* (WFP) serta memiliki masa jabatan lima tahun. *Executive Director* bertanggung jawab terhadap Dewan dalam hal administrasi *World Food Programme* (WFP), dan implementasi program serta aktivitas yang telah dijalankan oleh *World Food Programme* (WFP), penyediaan kebutuhan dewan, pemilihan dan penunjukan untuk staf dan organisasi kesekretariatan, memberikan pengarahan kepada staf *World Food Programme* (WFP) dalam berkoordinasi dengan FAO *staff Regulations and Rules* dan beberapa peraturan yang dibuat oleh *Executive Director* dengan persetujuan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal dan penunjukan perwakilan *World Food Programme* (WFP) untuk Negara-negara anggota. *Executive Director* membawahi sebelas divisi, yaitu *Inspector General and Oversight Services Division* (OSD), *Office of Evaluation* (OEDE), *Ethnics Office* (OEDX), *Policy, Planning and Strategy Division* (OEDP), *Communications and Public Policy Strategy Division* (OEDC), *Office of Hunger Solutions* (OEDH), *Office of the Ombudsman* (OEDO), *Office of Executive Director* (OED), *Finance and Legal Division* (FL), *Operations and Management Department* (OM), *External Affairs and Resource Deve lopment Department* (RE). Fungsi Executive Board:

1. Untuk membantu mengembangkan dan mengkoordinir kebijakan bantuan pangan jangka panjang dan jangka pendek
2. Mengawasi dan mengarahkan managemen WFP
3. Untuk memeriksa, mengubah, dan menyetujui program dan proyek kegiatan yang diserahkan oleh *Executive Director*
4. Untuk memeriksa, mengubah, dan menyetujui anggaran program, proyek kegiatan dan memeriksa administrasi serta pelaksanaan program dan proyek kegiatan WFP yang telah disetujui
5. Melaporkan program dan kegiatan WFP setiap tahunnya, termasuk didalamnya keputusan ke sesi substantif dari Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan FAO (http://www.wfp.org/about/executive-directorDiakses 15 Maret 2014).



Sumber: (http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp245047.pdf Diakses 14 Maret 2014).

Gambar 3.2
Struktur Organisasi *World Food Programme* (WFP)

3.1.1.4 Program-program *World Food Programme*

3.1.1.4.1 Padat Karya Pangan (*Food For Assets*-FFA)

Program Padat Karya Pangan (*Food For Assets*-FFA) (juga dikenal sebagai *Food for Work*) kegiatan ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan kegiatan fisik. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam kegiatan padat karya dan konservasi alam. Padat karya difokuskan pada kegiatan menumbuhkembangkan semangat bergotong royong agar bagaimana akses ekonomi bisa terjamin dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahtraan masyarakat yang mandiri. Petani yang tidak mampu mengambil risiko bereksperimen dengan metode pertanian baru, dalam hal ini WFP memberikan bantuan dengan metode pertanian baru. Pengangguran yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan, WFP memberdayakan masyarakat untuk mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan program *Food For Assets* (FFA). *World Food Programme* (WFP) memberikan pekerjaan yang memungkinkan bagi masyarakat daerah rawan pangan untuk bisa bertahan. Ini adalah tujuan dari program Padat Karya Pangan (*Food For Assets*-FFA) *World Food Programme* (WFP). Anggota masyarakat bekerja pada infrastruktur baru atau untuk belajar keterampilan baru yang akan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga atau masyarakat (http://www.wfp.org/food-assets Diakses 14 Maret 2014).

3.1.1.4.2 *Cash and Vouchers*

World Food Programme (WFP) memberikan ratusan ribu ton makanan setiap tahun, memberi orang lapar uang tunai atau voucher untuk membeli makanan. Uang tunai diberikan kepada orang-orang yang berjuang untuk menyediakan makanan bagi keluarga mereka, dan *voucher* dapat ditukar dengan makanan. Uang tunai dan *voucher* digunakan untuk mengatasi kelaparan di tempat-tempat di mana ada banyak makanan di pasar tapi di mana orang-orang miskin tidak mampu membelinya. Uang tunai dan *voucher* dapat mengurangi biaya transportasi dan menyimpan makanan, bermanfaat bagi perekonomian lokal, karena penerima menghabiskan uang di pasar lokal. Orang sering lebih memilih uang tunai dan voucher untuk bantuan makanan tradisional, karena mereka menawarkan lebih banyak pilihan dan variasi. WFP menggunakan cara-cara inovatif untuk memberikan bantuan, seperti "*e-voucher*" dikirim ke ponsel melalui pesan teks (http://www.wfp.org/cash-and-vouchers Diakses 14 Maret 2014).

3.1.1.4.3 *Response to HIV AIDS and Tuberculosis*

Nutrisi yang tepat adalah cara yang penting untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian orang yang hidup dengan HIV dan Tuberkulosis (TB). Peningkatan ketahanan pangan juga memainkan peran penting dalam membantu untuk menghentikan penyebaran epidemi. Peran *World Food Programme* (WFP) dalam mendukung penanggulangan HIV dan TB, pada tahun 2011, sebanyak 2,3 juta orang di 38 Negara melalui program HIV dan TB. WFP mengakui tantangan yang unik memberikan bantuan di daerah-daerah yang menderita HIV tinggi dan

prevalensi TB, kemiskinan dan rawan pangan yang mengakar dan sistem pemerintahan yang melemah. Mengingat tantangan yang ada dalam memerangi HIV dan TB, WFP berkomitmen untuk memaksimalkan keefektifan respon global. Dukungan makanan dan gizi WFP memainkan peran penting dalam mengurangi efek berbahaya dari HIV, TB, kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Ini adalah cara yang penting dan hemat biaya yang memungkinkan pengobatan, mengurangi angka kematian, dan mempromosikan pemulihan gizi (http://www.wfp.org/hiv-aids Diakses 14 Maret 2014).

3.1.1.4.4 *School Meals*

Visi *World Food Programme* adalah untuk mengurangi kelaparan di antara anak-anak sekolah sehingga kelaparan bukanlah hambatan bagi perkembangan mereka. Fakta bahwa hampir semua negara di dunia, baik maju dan berkembang, menyediakan makanan sekolah adalah bukti dari ini. Di banyak negara, langkah-langkah WFP untuk menyediakan makanan untuk sekitar 22 juta anak di 60 negara, sering kali ada daerah yang sulit dijangkau. WFP telah beroperasi dalam program sekolah selama lebih dari 50 tahun dan merupakan penyedia terbesar makanan sekolah. Maka dari pengalaman ini, WFP juga mendukung pemerintah nasional dalam mengembangkan kualitas mereka sendiri, program pemberian makanan di sekolah yang berkelanjutan (http://www.wfp.org/school-meals Diakses 14 Maret 2014).

3.1.1.5 *Funding World Food Programme* (Pendanaan WFP)

Dalam menjalankan misinya, *World Food Programme* (WFP) tidak mendapatkan dana dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), tetapi mendapatkannya dari kontribusi pemerintahan Negara-negara didunia, dan perusahaan-perusahaan. Untuk mendapatkan pihak-pihak yang ingin memberikan kontribusi bagi program *World Food Programme* (WFP) dan berhubungan dengan mereka dilakukan oleh *External Affairs and Resource Deve lopment Department* (RE). Sedangkan *Finance and Legal Division* (FL) bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Pelaksanaannya tugas *World Food Programme* (WFP) dilapangan diatur oleh *Operations and Management Department* (OM) yang memiliki garis koordinasi dengan *Executive Director* (http://www.wfp.org/about/senior-leadership Diakses 14 Maret 2014).

World Food Programme merupakan satu-satunya organisasi dibawah naungan PBB yang tidak mendapatkan alokasi dana dari PBB. Kontribusi yang didapatkan WFP berasal dari proyek kemanusiaan dan pembangunan, yaitu:

1. Pemerintah merupakan sumber dana pokok bagi WFP. Sekitar lebih dari 60 pemerintahan yang menanggung pembangunan proyek kemanusiaan dari WFP. Pemerintah melakukan dukungan secara sukarela dan sepenuhnya terhadap pembangunan proyek-proyek kemanusiaan tersebut.
2. Perusahaan, melalui program yang dimiliki, setiap perusahaan dapat membuat sebuah kontribusi penting untuk memerangi kelaparan dan membantu mengurangi rawan pangan yang terjadi. Kontribusi yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa sumbangan uang tunai perusahaan, produk atau

layanan yang dapat membantu WFP dalam menangani rawan pangan. Beberapa perusahaan yang memberikan kontribusi untuk WFP adalah Citi, DSM, *National Postcode Loterij* (*The Dutch Postcode Lottery*), TNT, *Unilever, Yum! Brands.*

3. Individual, sumbangan individu dapat berupa :
    a. Makanan khusus untuk anak-anak kelaparan di nurseries,
    b. Makanan insentif untuk mendorong keluarga miskin agar mengirim anak perempuan mereka ke sekolah,
    c. Makanan sebagai alat untuk membayar orang-orang yang membangun kembali sekolah, jalanan dan infrastruktur lain setelah terjadinya konflik dan bencana alam.

Sumbangan yang diberikan dapat berupa uang dalam dolar Amerika (*cash*), sumbangan dalam bentuk jasa (*services*), dan dalam bentuk komoditi pertanian (*commodity*). *World Food Programme* memiliki 20 pesawat terbang, kapal, dan lebih dari 5000 truk untuk mengirimkan makanan kepada yang membutuhkan. Selama tiga tahun pertama *World Food Programme* beroperasi (1963-1965) tidak kurang dari US$ 100 juta sumber dana didapatkan oleh *World Food Programme*. Di tahun 2005, *World Food Programme* memperoleh dana hampir sekitar US$ 2,8 juta dari kontribusi negara-negara. Seluruh dana sepenuhnya yang diperoleh berdasarkan sumbangan sukarela. Jenis sumbangan (*pledge*) kepada WFP dapat berbentuk :

a) *Cash*: Sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang (US $),

b) *Services*: Sumbangan dalam bentuk jasa,

c) *Commodity*: Dalam bentuk komoditi pertanian (http://www.wfp.org/about/ Funding Diakses 14 Maret 2014).

3.1.1.6 Keanggotaan Indonesia di *World Food Programme* (WFP)

Keanggotaan Indonesia di *World Food Programme* (WFP) sangat penting karena badan tersebut menangani program bantuan kepada pengungsi, anak-anak sekolah (*School Feeding Program*) kepada pembangunan masyarakat desa, rehabilitasi lahan kritis, program bantuan masyarakat terasing, dan program bantuan pangan untuk musibah banjir. Selain itu, *World Food Programme* (WFP) juga dapat membantu dalam memformulasikan kebijakan bantuan pangan jangka panjang dan jangka pendek bagi Negara-negara anggotanya. Bantuan yang diterima Indonesia sejak tahun 1963 hingga 1991 dalam bentuk *joint programme* sebanyak 58 kegiatan dengan nilai total US$ 210,819,881. Bentuk *joint programme* yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya penanggulangan akibat bencana alam dan penanganan pengungsi, rehabilitasi irigasi, reboisasi daerah aliran sungai dan pengembangan lahan tanah tadah hujan. Karena kemajuan ekonomi di Indonesia sejak terciptanya swasembada beras tahun 1984, *World Food Programme* (WFP) telah menganggap Indonesia tidak termasuk lagi sebagai negara penerima bantuan *World Food Programme* (WFP). *World Food Programme* (WFP) bahkan telah menutup kantor perwakilannya di Jakarta sejak tahun 1995. Namun pada bulan Mei 1998, Indonesia kembali menjadi anggota *World Food Programme* (WFP) karena keadaan kesulitan pangan yang dialami oleh bangsa Indonesia sebagai dampak negatif dari krisis finansial Asia dan

karena terjadinya kekeringan berkepanjangan akibat badai EL-Nino. Hal ini ditandai dengan diperolehnya bantuan *World Food Programme* (WFP) dalam bentuk *Emergency Operation* (EMOP 6008) yang kemudian disusul dengan program *Protacted Relief and Recovery Operation* (PRRO) yaitu program penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat di Jakarta dan Surabaya melalui Departemen Pertanian sebanyak 160.000 ton, yang dialoksikan untuk tahun anggaran. 1998/1999 sebanyak 112.000 ton untuk 539.701 kepala keluarga (KK) Pra Sejahtera dan pada tahun 1999/2000 sebanyak 48.000 ton untuk 231.299 KK Pra Sejahtera (http://www.deptan.go.id Diakses pada 15 Maret 2014).

Pada periode 2003-2005, Indonesia kembali menjadi anggota *Executive Board* WFP. Pemilihan *Executive Board* tersebut dilaksanakan pada sidang ke-123 Dewan FAO pada 28 Oktober-2 November 2002 di Roma, Italia. Indonesia sempat berhenti sebagai anggota *Executive Board* sejak tahun 1997 sampai 2001, karena pada saat itu Indonesia mendapat kehormatan menjadi ketua Dewan FAO. Kontribusi (*pledge*) Indonesia dari tahun 1963-1998 kepada *World Food Programme* (WFP) sebesar 2.289,95 juta ton komoditi pertanian senilai US$ 2,760,480. Namun untuk tahun 1999 Indonesia tidak lagi memberikan bantuan karena saat itu Indonesia mengalami musibah kekeringan berkepanjangan akibat El-Nino, kebakaran hutan dan krisis ekonomi. Rakyat Indonesia memberikan bantuan pangan kepada rakyat Timor Leste, dilaksanakan di Timor-Leste pada tanggal 7 Mei 2004, bantuan Rakyat Indonesia kepada Rakyat Timor-Leste berupa: bantuan beras (Badan Urusan Logistik-BULOG): 35 ton, bantuan dari Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI) sebesar Rp. 30 juta

(lebih kurang seharga 15 ton beras), bantuan Badan Koordinasi Assosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (BKAPTRI) 10 ton gula pasir, bantuan Indo Food 500 kardus (http://www.scribd.com/doc/128230157/Food-and-Agriculture-Organizat Ion Diakses 15 Maret 2014).

3.1.2 *Food For Assets* (FFA) di Indonesia

Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam antisipasi bencana dan perubahan iklimmelalui program Padat Karya Pangan (*Food for Asset* - FFA), *World Food Programme* (WFP) memfasilitasi pembangunan aset masyarakat yang berguna untuk mengantisipasi dampak bencana alam dan perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat rawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan aset menerima insentif beras sebagai pengganti waktu dan jasa yang mereka berikan (*World Food Programme brochure*, 2013).

Karena kasus rawan pangan yang terjadi sebagian besar di daerah pedesaan, maka model kegiatan yang cocok adalah Program Padat Karya Pangan (*Food For Assets*-FFA). *World Food Programme* berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi keluarga rentan rawan pangan untuk membangun fasilitas pertanian skala kecil serta aset infrastruktur pedesaan yang menguntungkan bagi komunitas mereka melalui progam Padat Karya Pangan (*Food for Assets*-FFA) atau bisa disebut juga *Food For Work*. Kegiatan tersebut menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan kegiatan fisik.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam kegiatan padat karya dan konservasi alam. Aset-aset dirancang untuk menguatkan ketahanan mereka atas perubahan iklim dan dapat segera membantu kelansungan mata pencaharaian dan ketahanan pangan. Difokuskan pada kegiatan menumbuhkembangkan semangat bergotong royong agar bagaimana akses ekonomi bisa terjamin dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahtraan masyarakat. Merupakan program yang dirancang untuk pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur dimusim sepi kerja atau hilangnya pekerjaan serta pendapatan akibat bencana alam yang sulit diproyeksikan. Kegiatan padat karya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan prioritas dan kriteria disesuaikan kondisi daerah. Polanya adalah mempekerjakan tenaga atau masyarakat selama 4 hari namun diberikan upah selama 6 hari, didukung seperti pengadaan material dan juga bibit tanaman. Program ini lebih pada prioritas akses jalan wisata tani bagi daerah-daerah dan dusun-dusun terisolir. Yang terpenting adalah penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui sistem pengelolaan aset milik masyarakat umum seperti pengelolaan embung-embung rakyat.Jadi prinsipnya, selain pemberdayaan masyarakat, masalah kemitraan dan pemberdayaan kelembagaan di desa itu sendiri juga sangat penting. Bagaimana aset masyarakat seperti embung bisa dikelola dengan baik untuk pendapatan ekonomi masyarakat (http://www.sumbawanews.com/berita/kecamatan-pujut-dan-janapria-lokasi-padat-karya-wfp Diakses 10 Maret 2014).

Kebijakan inti dan strategi yang mengatur kegiatan *World Food Programme* (WFP) adalah untuk memberikan bantuan pangan: untuk menyelamatkan kehidupan dalam pengungsi dan situasi darurat lainnya, untuk meningkatkan gizi dan kualitas hidup orang-orang yang paling rawan pada saat-saat penting dalam hidup mereka, dan untuk membantu membangun aset dan mempromosikan kemandirian masyarakat miskin, khususnya melalui program padat karya, antara lain:

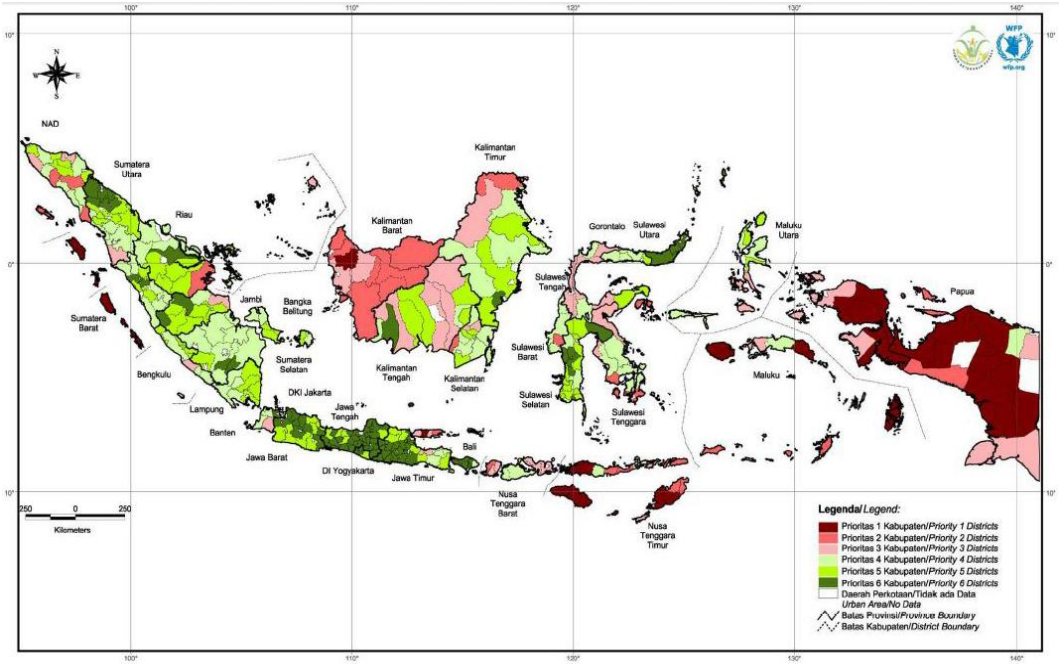
1. Dalam kasus pertama, bantuan pangan sangat penting untuk perlindungan sosial dan kemanusiaan. Ini akan digunakan dengan cara yang sama, konsisten dengan menyelamatkan nyawa. Sedapat mungkin, pemberian bantuan makanan akan dikoordinasikan dengan bantuan pemulihan yang diberikan oleh organisasi kemanusiaan lainnya.
2. Dalam kasus kedua, bantuan pangan merupakan investasisumber daya manusia.
3. Dalam kasus ketiga, menggunakan sumber daya masyarakat miskin yang paling melimpah, tenaga kerja mereka sendiri, untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan juga membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

World Food Programme (WFP) memainkan peran utama dari bantuan darurat ke pembangunan. *World Food Programme* (WFP) akan memberikan prioritas untuk mendukung pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan mitigasi dan pasca-bencana, kegiatan rehabilitasi sebagai bagian dari program pembangunan. Sebaliknya, bantuan darurat akan digunakan untuk melayani bantuan dan tujuan

pembangunan. Dalam kedua kasus tujuan keseluruhan adalah untuk membangun kemandirian (http://www.wfp.org/about/strategic-plan Diakses 14 Maret 2014).

3.1.3 Rawan Pangan di Indonesia

Jumlah penduduk miskin terus meningkat di Indonesia, dengan demikian semakin banyak orang yang menghadapi rawan pangan. Terjadinya kasus rawan pangan di beberapa daerah, menunjukkan bahwa masalah rawan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri. Pangan sebagai kebutuhan pokok terpenting, memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan kondisi kesehatan, kecerdasan dan produktivitas sumber daya manusia. Disamping itu pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan pondasi kuat untuk pembentukan kualitas manusia bangsa Indonesia, merupakan pilar bagi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya, serta merupakan hak asasi setiap manusia atas pangan (http://www.tempo.co/read/news/2010/01/31/058222435/Ada-100-Daerah-di-Kabupaten-se-Indonesia-Rawan-Pangan Diakses 15 Maret 2014).



Sumber: (*Food Security and Vulnerability Atlas of* Indonesia, 2009).

Gambar 3.3
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Indonesia

Dari gambar 3.3, *World Food Programme* dan Dewan Ketahanan Pangan Indonesia memetakan 346 kabupaten yang memiliki data lengkap untuk 9 indikator terkait kerawanan pangan. Di antara 346 kabupaten tersebut, maka ditetapkan 100 kabupaten dengan yang prioritas yang terdiri dari 30 kabupaten Prioritas 1, 30 kabupaten Prioritas 2, dan 40 kabupaten Prioritas 3, dengan jumlah penduduk sekitar 25 juta. 246 kabupaten lainnya dikelompokkan menjadi Prioritas 4-6. Perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada kabupaten yang termasuk pada Prioritas 1 hingga 3.

1. 30 kabupaten prioritas 1, 11 kabupaten di provinsi Papua, 6 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 5 kabupaten di Papua Barat dan 8 kabupaten di 5 provinsi lainnya, dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta. Tingkat kerawanan pangan terutama disebabkan karena tingginya angka kemiskinan, tidak ada akses

listrik, tingginya *underweight* pada balita, tidak ada akses jalan kendaraan roda empat dan tidak ada sumber air bersih.

2. Dari 30 kabupaten di Prioritas 2, 7 kabupaten di provinsi Kalimantan Barat, 5 di kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 4 kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam, 3 kabupaten di papua dan 11 kabupaten di 9 provinsi lainnya, dengan jumlah penduduk sekitar 7,7 juta orang. Penentu utama kerawanan pangan di Prioritas 2 hampir sama dengan Prioritas 1 meskipun urutannya sedikit berubah yaitu: tingginya angka *underweight* pada balita, tidak ada akses kendaraam roda empat, tidak ada sumber air bersih, tingginya kemiskinan dan tidak ada akses listrik.
3. Dari 40 kabupaten Prioritas 3, 6 kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, 5 kabupaten di Sulawesi Tengah, 4 Kabupaten di NTB dan 25 kabupaten di 16 provinsi lainnya, dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta. Kerawanan pangan pada Prioritas 3 terutama disebabkan karna tidak ada akses air bersih, tingginya rasio kebutuhan produksi, dan gagal panen.

Tabel 3.1
Rawan Pangan Di Indonesia Tahun 2008

Kategori	Provinsi	Jumlah Kabupaten Yang Rawan Pangan	Prio-ritas	Aspek Rawan Pangan	Penyebab Tingkat Kerawanan Pangan
Rawan Pangan Kronis	1. Papua	14	1,2,3	Masalah Kesehatan, Masalah Ketersediaan Pangan, Masalah Kemiskinan	Tingginya angka kemiskinan, Tidak ada akses listrik, Tingginya *underweight* pada balita, Tidak ada
	2. Nusa Tenggara Timur	11	1,2,3		
	3. Papua Barat	5	1		
	4. Kalimantan Barat	7	2		
	5. Nangroe Aceh	4	2		

	Darussalam				akses jalan kendaraan roda empat, Tidak ada sumber air bersih.
Rawan Pangan Sementara	6.Kalimantan Tengah 7. Sulawesi Tengah 8. Nusa Tenggara Barat	6 5 4	3 3 3	Masalah daerah tak berhutan, Puso, Daerah rawan longsor dan banjir, Fluktuasi (penyimpangan curah hujan)	Tidak ada akses air bersih, Tingginya rasio kebutuhan produksi pangan, Gagal panen

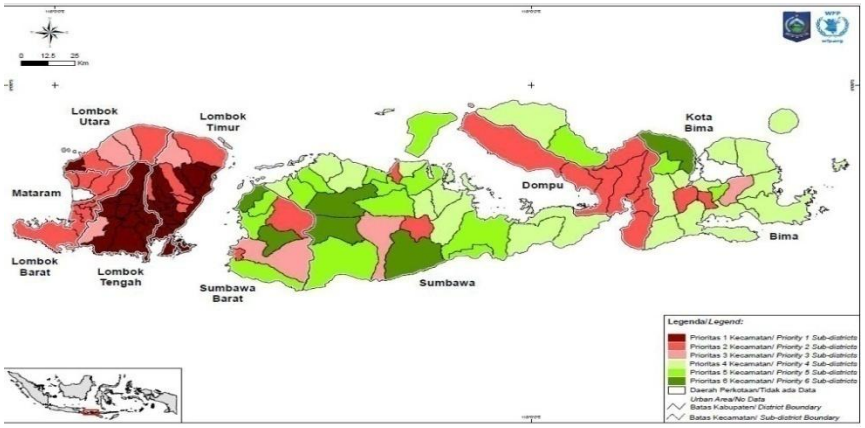
Sumber: (*Food Security and Vulnerability Atlas of* Indonesia, 2009).

3.1.3.1 Potensi Rawan Pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak dibarat dan Sumbawa yang terletak ditimur. Ibukota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di pulau Lombok. Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,20 km2. Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 m dari permukaan laut sementara Taliwang terendah dengan 11 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.Batas Wilayah: Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat dengan Selat Lombok (Propinsi Bali), sebelah Timur dengan Selat Sape (Propinsi Nusa

Tenggara Timur). Banyak tempat wisata yang disukai dan dikunjungi, 5 diantaranya yang paling popular adalah Trio Gili (Pulau Gili Trawangan, Gili Meno & Gili Air), Pantai Senggigi, Taman Nasional Gunung Rinjani, Pantai Kuta Lombok, Tanjung Aan (http://www.ntbprov.go.id/tentang_geografis.php Diakses 9 April 2014).

Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat adalah tanah yang subur yang menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk Pulau Lombok yang 90% adalah Petani. Komoditas tanaman yang menjadi andalan utama para Petani di daerah ini adalah tembakau (*mangrove*), jagung, padi, kopi, dan kapas. Meskipun Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga menghasilkan padi yang melebihi kebutuhan daerahnya hingga 500.000 ton setara beras, ternyata pada tahun 2008 beberapa kecamatan yang tergolong rawan pangan, yaitu 19 kecamatan di Lombok Timur, 11 kecamatan di Lombok Tengah, 10 kecamatan di Lombok Barat, 9 kecamatan di Dompu, 2 kecamatan di Lombok Utara (*Food Security and Vulnerability Atlas of* Nusa Tenggara Barat, 2010).



Sumber: (*Food Security and Vulnerability Atlas of* Nusa Tenggara Barat, 2010).

Gambar 3.4
Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari gambar 3.4, di antara 105 kecamatan tersebut, ditetapkan 64 kecamatan dengan prioritas yang lebih tinggi yang terdiri dari 26 kecamatan Prioritas 1, 31 kecamatan Prioritas 2, dan 7 kecamatan Prioritas 3, dengan jumlah penduduk 3,1 juta orang. 41 kecamatan lainnya dikelompokkan menjadi Prioritas 4-6. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada kecamatan yang termasuk dalam Prioritas 1-3.

1. Terdapat 26 kecamatan Prioritas 1, 14 kecamatan di Lombok Timur dan 11 kecamatan di Lombok Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta orang.
2. Dari 31 kecamatan di Prioritas 2, 10 kecamatan di Lombok Barat, 5 kecamatan di Lombok Timur, dan 9 kecamatan di Dompu, dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta orang.
3. Dari 7 kecamatan Prioritas 3, 2 kecamatan di Lombok Utara, dengan jumlah penduduk sekitar 202 ribu orang.

Pemetaan ini menggambarkan tingkat kemungkinan terjadinya kerawanan pangan suatu kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dengan perkataan lain, kecamatan-kecamatan yang berwarna merah memiliki tingkat resiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan kecamatan-kecamatan yang berwarna hijau sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, Prioritas 1 (warna merah tua) tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan. Sebaliknya juga pada kecamatan di Prioritas 6 (warna hijau tua) tidak berarti bahwa semua penduduknya tahan pangan.

Tabel 3.2
64 Kecamatan Rawan Pangan di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten	Kecamatan	Prioritas
Lombok Tengah	Praya Barat	1
Lombok Tengah	Pujut	1
Lombok Tengah	Praya Timur	1
Lombok Tengah	Janapria	1
Lombok Tengah	Kopang	1
Lombok Tengah	Praya	1
Lombok Tengah	Praya Tengah	1
Lombok Tengah	Jonggat	1
Lombok Tengah	Pringgarata	1
Lombok Tengah	Batukliang	1
Lombok Tengah	Batukliang Utara	1
Lombok Timur	Keruak	1
Lombok Timur	Jerowaru	1
Lombok Timur	Sakra	1
Lombok Timur	Sakra Utara	1
Lombok Barat	Kediri	2
Lombok Barat	Kuripan	2
Lombok Barat	Narmada	2
Lombok Barat	Lingsar	2
Lombok Barat	Gunung Sari	2
Lombok Barat	Batu Layar	2
Lombok Timur	Montong Gading	2
Lombok Timur	Suralaga	2
Lombok Timur	Selong	2
Lombok Timur	Aikmel	2
Lombok Timur	Sambelia	2
Sumbawa	Sumbawa	2
Sumbawa	Lantung	2
Dompu	Hu'u	2
Dompu	Pajo	2
Dompu	Dompu	2
Dompu	Woja	2

Kabupaten	Kecamatan	Prioritas
Lombok Timur	Sakra Timur	1
Lombok Timur	Terara	1
Lombok Timur	Sikur	1
Lombok Timur	Masbagik	1
Lombok Timur	Pringgasela	1
Lombok Timur	Sukamulia	1
Lombok Timur	Labuhan Haji	1
Lombok Timur	Pringgabaya	1
Lombok Timur	Suela	1
Lombok Timur	Wanasaba	1
Lombok Utara	Pemenang	1
Lombok Barat	Sekotong Tengah	2
Lombok Barat	Lembar	2
Lombok Barat	Gerung	2
Lombok Barat	Labu Api	2
Dompu	Kilo	2
Dompu	Kempo	2
Dompu	Manggalewa	2
Dompu	Pekat	2
Bima	Woha	2
Bima	Belo	2
Sumbawa Barat	Maluk	2
Sumbawa Barat	Brang Rea	2
Lombok Utara	Tanjung	2
Lombok Utara	Bayan	2
Lombok Tengah	Praya Barat Daya	3
Lombok Timur	Sembalun	3
Sumbawa	Lenangguar	3
Bima	Wawo	3
Sumbawa Barat	Jereweh	3
Lombok Utara	Gangga	3
Lombok Utara	Kayangan	3

Sumber: (*Food Security and Vulnerability Atlasof* Nusa Tenggara Barat, 2010).

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah wilayah yang terus aktif menemukan alternatif solusi dalam mengurangi potensi rawan pangan di daerahnya. Terjadinya kasus rawan pangan, menunjukkan bahwa masalah kerawanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri. Mayoritas keluarga pedesaan di Nusa Tenggara Barat saat ini masih mengandalkan pertanian skala kecil dengan sistem irigasi

menggunakan air hujan. Risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrim diperkirakan memiliki efek negatif terhadap kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, membuat mereka semakin berisiko mengalami kerawanan pangan yang kronis (http://www.tempo.co/read/news/2010/01/31/058222435/Ada-100-Daerah-di-Ka bupaten-se-Indonesia-Rawan-Pangan Diakses 9 April 2014).

Perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat merupakan tantangan paling serius yang dihadapi, seiring dengan semakin tingginya dampak dari perubahaniklim seperti peningkatan frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan sertapeningkatan periodisitas El Nino dan La Nina. Perubahan iklim yang dapat berdampak secara signifikan terhadap ketahanan pangan, baik dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kualitas pangan dan gizi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mencari solusi agar Nusa Tenggara Barat mengurangi potensi rawan pangan kearah yang kronis, karena Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai daerah rawan pangan sementara (*transitory food insecurity*). Dengan kata lain maka kerawanan pangan sementara dapat mempengaruhi orang-orang yang berada pada kondisi rawan pangan kronis dan juga orang-orang yang terjamin pangannya pada keadaan normal. Artinya jika kerawanan pangan sementara tidak diatasi maka akan berakibat kerawanan pangan yang kronis. Apabila kerawanan pangan dianalisa dari segi lingkungan hidup, faktor lingkungan dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi kerawanan pangan sangat menentukan apakah wilayah dapat mempertahankan ketahanan pangannya. Tinjauan dari sudut pandang lingkungan hidup meliputi perhatian terhadap pengelolaan tanah, pengelolaan air, peningkatan

teknologi pra-panen, pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan hutan. Deforestasi hutan melalui eksploitasi sumber daya alam, fluktuasi curah hujan, persentase daerah puso dan persentase daerah yang terkena banjir dan tanah longsor, merupakan beberapa indikator yang di gunakan dalam untuk menjelaskan kerawanan pangan sementara atau *transient* di provinsi Nusa Tenggara Barat (*Food Security and Vulnerability Atlasof* Nusa Tenggara Barat, 2010).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh *World Food Programme* (WFP) dan Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat yang diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2.1.1 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai informan adalah sebagai berikut :

1. Staff perwakilan *World Food Programme* untuk Indonesia. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar kinerja *World Food Programme* secara

umum, dan pelaksanaan program *Food For Assets* di Nusa Tenggara Barat.

2. Staff perwakilan Badan Ketahanan Nusa Tenggara Barat. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar kerawanan pangan di Nusa Tenggara Barat.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan, Penelusuran Data Online, Dokumentasi, dan Wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada peran suatu organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan di Nusa Tenggara Barat, dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

Studi Kepustakaan, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Diharapkan dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan data sekunder.

Penelusuran data online, penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

Metode Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, *brochure* dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.

Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Diharapkan dengan teknik wawancara peneliti dapat mengumpulkan data primer.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu staff dalam bidang dokumentasi yang secara komprehensif mendeskripsikan seputar program-program yang dilakukan oleh *World Food Programme* (WFP) di wilayah Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat, juga untuk mendapatkan data-data mengenai *Annual Report* dari program *Food For Assets* (FFA) *World Food Programme* (WFP).

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni Perwakilan *World Food Programme* untuk Indonesia.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat, diantaranya:

1. Kantor *World Food Programme* untuk Indonesia, Wisma Keiai, Jl. Jendral Sudirman Kav.3 Lantai 9, Jakarta Pusat.
2. Kantor BPS Pusat, Badan Pusat Statistik (BPS), Jl. Dr. Sutomo No.6-8, Jakarta.
3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.112-114, Bandung.

4. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.46, Bandung.
5. Perpustakaan LIPI, Jalan Sangkuriang, Komplek LIPI, Gedung 40, Bandung.

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Januari hingga Agustus 2014, yang dirinci sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Peneitan							
		2014							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
1	Pengajuan Judul								
2	Pembuatan Usulan Penelitian								
3	Seminar Usulan Penelitian								
4	Bimbingan Skripsi								
5	Pengumpulan dan Analisis Data								
6	Sidang								